

Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017



Jl Brigjend Katamso No 139 (Dalem Jayadipuran)

Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55152

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 8 Januari 2018
Kepala,



Dra. Christriyati Ariani, M.Hum.
NIP 19640108 199103 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	47
VI. Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA D.I. YOGYAKARTA**

DALEM JAYADIPURAN, JL. BRIGJEND KATAMSO NO 139 YOGYAKARTA 55152
TELEPON 0274-373241, 0274-379308, FAKSIMILE 0274-381555

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 8 Januari 2018

Kepala,

Dra. Christriyati Ariani, M.Hum.
NIP 19640108 199103 2 001

Laporan Keuangan Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp225, lebih tinggi dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp11.937.348.476 atau mencapai 92,33 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp12.929.564.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017 .

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp79.154.454.886 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp17.407.391; Aset Tetap (neto) sebesar Rp79.136.945.676; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp101.819.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp10.497.169 dan Rp79.143.957.717.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp12.453.087.941 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(12.453.087.941). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp1.022.910 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(12.452.065.031)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp18.702.249.356 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(12.452.065.031) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp60.956.425.141 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.937.348.251 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp79.143.957.717.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017		% thd Angg	TA 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	-	6.000.590
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	-	6.000.590
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	6.292.797.000	5.640.799.966	89,64	6.264.240.657
Belanja Barang	B.4	6.427.811.000	6.090.658.010	94,75	4.481.633.779
Belanja Modal	B.5	208.956.000	205.890.500	98,53	416.326.750
JUMLAH BELANJA		12.929.564.000	11.937.348.476	92,33	11.162.201.186

II. NERACA

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NERACA PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	17.407.391	17.316.048
Jumlah Aset Lancar		17.407.391	17.316.048
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	70.041.447.000	14.254.245.000
Peralatan dan Mesin	C.14	4.174.123.990	3.968.233.490
Gedung dan Bangunan	C.15	7.695.421.000	4.092.208.900
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	100.550.000	100.550.000
Aset Tetap Lainnya	C.17	495.252.250	495.252.250
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(3.369.848.564)	(4.205.308.648)
Jumlah Aset Tetap		79.136.945.676	18.705.180.992
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	169.546.850	169.546.850
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(169.445.031)	(168.639.625)
Jumlah Aset Lainnya		101.819	907.225
JUMLAH ASET			
		79.154.454.886	18.723.404.265
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	10.497.169	21.154.909
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.25	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.497.169	21.154.909
JUMLAH KEWAJIBAN			
		10.497.169	21.154.909
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	79.143.957.717	18.702.249.356
JUMLAH EKUITAS			
		79.143.957.717	18.702.249.356
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
		79.154.454.886	18.723.404.265

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5.630.575.828	6.263.567.279
Beban Persediaan	D.3	31.576.288	66.902.642
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.056.437.743	2.641.089.609
Beban Pemeliharaan	D.5	306.722.614	352.628.739
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.980.414.105	1.389.951.195
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	716.005.000	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	731.356.363	654.742.489
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		12.453.087.941	11.368.881.953
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(12.453.087.941)	(11.368.881.953)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	D.11	225	6.000.590
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL		-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		1.794.185	1.881.719
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		(771.500)	(1.395.030)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.022.910	6.487.279
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(12.452.065.031)	(11.362.394.674)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	D.12	-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(12.452.065.031)	(11.362.394.674)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	E.1	18.702.249.356	18.842.623.801
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(12.452.065.031)	(11.362.394.674)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	60.956.425.141	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	-	(211.053.145)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	(20.421.935)
JUMLAH		60.956.425.141	(231.475.080)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	11.937.348.251	11.453.495.309
EKUITAS AKHIR	E.6	79.143.957.717	18.702.249.356

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan melalui kegiatan pengkajian, perlindungan, pengembangan, fasilitasi dan pemanfaatan budaya lokal. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan. Melalui peran tersebut diharapkan masyarakat akan mengenal, mencintai dan melestarikan warisan nilai-nilai budaya.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen dengan visi ***“Mewujudkan ketahanan nilai-nilai budaya dalam upaya menuju bangsa yang bermartabat dan berkarakter”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan pelaksanaan pengkajian terhadap aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan.
- Meningkatkan pelaksanaan pendokumentasian terhadap aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan.
- Meningkatkan kualitas pengkajian, inventarisasi dan pendokumentasian karya budaya.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas kemitraan dan fasilitasi aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dengan *stakeholder* di wilayah kerja BPNB Daerah Istimewa Yogyakarta (Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur).

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem

Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

*Penyusutan
Aset Tetap*

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Sejak awal sampai dengan akhir pelaksanaan anggaran tahun 2017, Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY telah mengadakan empat kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal seiring dengan kebijakan penghematan anggaran oleh pemerintah. Rincian anggaran awal dan anggaran setelah revisi ke-4 adalah sebagai berikut:

URAIAN	2017	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	6.292.797.000	6.292.797.000
Belanja Barang	6.893.923.000	6.427.811.000
Belanja Bansos	-	-
Belanja Modal	208.956.000	208.956.000
Jumlah Belanja	13.395.676.000	12.929.564.000

Realisasi
Pendapatan
Rp225

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp225, lebih tinggi dari dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Balai Pelestarian Nilai Budaya terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	-	225	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	-	-	-
Jumlah	-	225	-

Realisasi Pendapatan Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY TA 2017 mengalami penurunan signifikan dibandingkan TA 2016. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah belanja pegawai, barang, dan modal tahun anggaran yang lalu yang harus dikembalikan mengalami penurunan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	225	6.000.590	(100,00)
Jumlah	225	6.000.590	(100,00)

Realisasi Belanja
Negara
Rp11.937.348.476

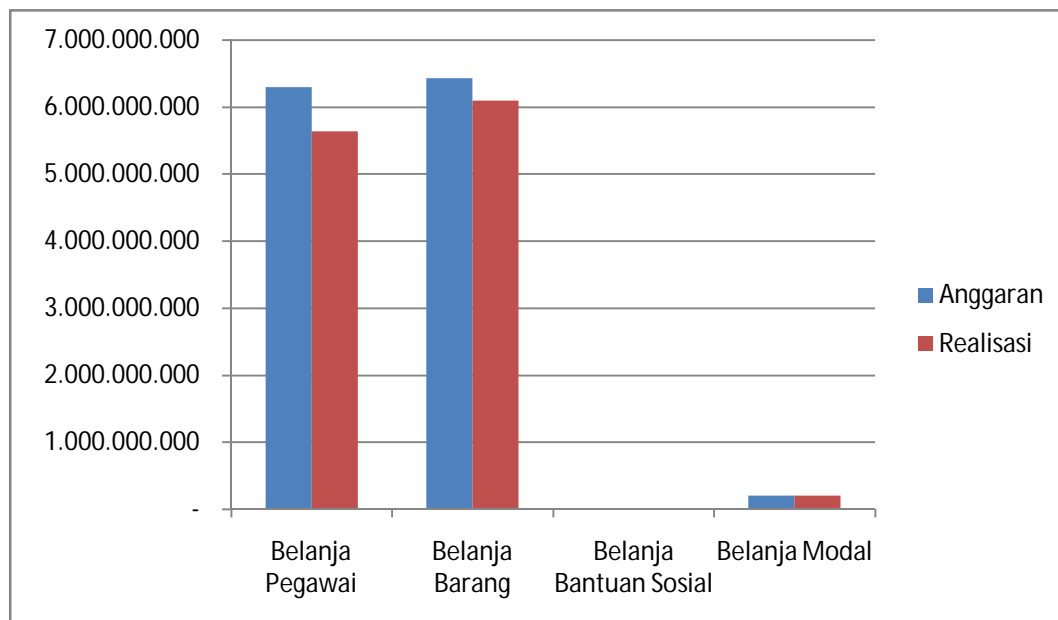
B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2017 adalah sebesar Rp11.937.348.476 atau 92,33% dari anggaran belanja sebesar Rp12.929.564.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2017

URAIAN	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6.292.797.000	5.649.088.172	89,77
Belanja Barang	6.427.811.000	6.092.234.010	94,78
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	208.956.000	205.890.500	98,53
Total Belanja Kotor	12.929.564.000	11.947.212.682	92,40
Pengembalian Belanja	-	(9.864.206)	-
Jumlah	12.929.564.000	11.937.348.476	92,33

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 6,94% (tidak signifikan). Hal ini disebabkan antara lain karena terdapat kenaikan volume kegiatan yang dilakukan pada TA 2017 dibandingkan pada TA 2016. Pada TA 2016 ada kegiatan yang dihapus sebagai dampak diberlakukannya kebijakan penghematan dan pemotongan anggaran, dan

anggaran tersebut baru dilaksanakan pada TA 2017.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5.640.799.966	6.264.240.657	(9,95)
Belanja Barang	6.090.658.010	4.481.633.779	35,90
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	205.890.500	416.326.750	(50,55)
Jumlah	11.937.348.476	11.162.201.186	6,94

*Belanja Pegawai
Rp5.640.799.966*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.640.799.966 dan Rp6.264.240.657.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar 9,95 persen dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya perubahan klasifikasi akun untuk honor tenaga cleaning service, pengamanan, dan sopir non PNS dari 511511 ke 521111.
2. Adanya Pegawai Negeri Sipil yang purna tugas pada periode TA 2017;
3. Adanya penurunan jumlah personel dan frekuensi lembur.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.628.301.172	5.995.346.347	(6,12)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	249.600.000	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	20.787.000	29.696.000	(30,00)
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	5.649.088.172	6.274.642.347	(9,97)
Pengembalian Belanja Pegawai	(8.288.206)	(10.401.690)	(20,32)
Jumlah Belanja	5.640.799.966	6.264.240.657	(9,95)

*Belanja Barang
Rp6.090.658.010*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.090.658.010 dan Rp4.481.633.779. Realisasi Belanja Barang TA 2017

mengalami kenaikan 35,90 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya perubahan klasifikasi akun untuk honor tenaga cleaning service, pengamananan, dan sopir non PNS dari 511511 ke 521111 serta penambahan kegiatan dan anggaran belanja barang pada TA 2017.

Terdapat perubahan klasifikasi akun untuk belanja yang berkaitan dengan penerbitan jurnal, majalah, hasil penelitian, cerita bergambar, dan proseding dari 521211 (belanja bahan) ke 526311 (belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat).

Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	505.313.978	250.252.285	101,92
Belanja Barang Non Operasional	1.461.105.030	1.479.028.120	(1,21)
Belanja Jasa	1.092.028.337	970.527.852	12,52
Belanja Pemeliharaan	289.936.553	338.195.687	(14,27)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.980.414.105	1.389.951.195	42,48
Belanja Barang Persediaan	47.431.007	53.678.640	(11,64)
Belanja Barang Lainnya utk Diserahkan kpd Msyr	716.005.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	6.092.234.010	4.481.633.779	35,94
Pengembalian Belanja	(1.576.000)	-	-
Jumlah Belanja	6.090.658.010	4.481.633.779	35,90

*Belanja Modal
Rp205.890.500*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp205.890.500 dan Rp416.326.750. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2017 mengalami penurunan sebesar 50,55% dibandingkan TA 2016 disebabkan oleh pada tahun 2017 BPNB D.I. Yogyakarta menganggarkan lebih sedikit dana untuk belanja modal yang hanya berupa belanja peralatan dan mesin, sementara pada 2016 juga mencakup jaringan serta gedung dan bangunan. Pada TA 2017, BPNB D.I. Yogyakarta melaksanakan pengadaan mesin cuci kendaraan, almari besi/metal, *filling cabinet* besi, kursi besi, kursi *fiber glass*/plastik, mesin penghisap debu, AC *split*, *barcode scanner*, *video camera*, printer, *handy talky*, UPS, *computer server*, *memory card*, *harddisk* eksternal, dan mesin absen *fingerprint*.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.890.500	162.474.000	26,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	154.762.000	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	100.550.000	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	205.890.500	417.786.000	(50,72)
Pengembalian	-	(1.459.250)	-
Jumlah Belanja	205.890.500	416.326.750	(50,55)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta tidak melakukan pembelian tanah di kedua periode tersebut.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 adalah sebesar Rp205.890.500, mengalami kenaikan sebesar 26,72 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 sebesar Rp161.014.750 (belanja kotor Rp162.474.000 dikurangi pengembalian sebesar Rp1.459.250 karena adanya kesalahan pembebanan akun belanja). Hal ini disebabkan karena jumlah dan jenis barang yang dibeli lebih banyak.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	66.447.500	67.025.000	(0,86)
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	139.443.000	95.449.000	46,09
Jumlah Belanja Kotor	205.890.500	162.474.000	26,72
Pengembalian	-	(1.459.250)	-
Jumlah Belanja	205.890.500	161.014.750	27,87

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan 154.762.000. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi TA 2016 karena pada tahun 2017 Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta tidak melaksanakan pembangunan gedung dan bangunan apapun, sedangkan pada TA 2016 dilaksanakan pembangunan garasi permanen dan sudah diselesaikan pada TA 2016.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	154.762.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	-	154.762.000	(100,00)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	154.762.000	(100,00)

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp100.550.000. Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta pada tahun 2016 melaksanakan pengadaan penyambungan daya listrik 33.000 VA dan rehabilitasi instalasi listrik, sementara pada tahun 2017 tidak melakukan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2017	T.A. 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	-	100.550.000	(100,00)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	100.550.000	(100,00)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	100.550.000	(100,00)

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta tidak mengelola Belanja Modal Lainnya di kedua periode tersebut

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa pada akhir tahun bendahara pengeluaran harus menihilkan uang yang dikelolanya. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TA 2017	TA 2016
Bank BPD DIY Cabang Senopati No.Rek 006111001205	-	-
Uang Tunai	-	-
Uang muka yang dibawa oleh panitia kegiatan	-	-
Kuitansi yang belum di-SP2D-kan	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki bendahara penerimaan karena bukan merupakan satuan kerja yang mengelola penerimaan perpajakan maupun pendapatan negara bukan pajak.

Kas Lainnya dan Setara
Kas
Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	TA 2017	TA 2016
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	-
Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor	-	-
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	-
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TA 2017	TA 2016
Piutang PNBPN	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	TA 2017	TA 2016
	- tidak ada -	-	-
	Jumlah	-	-

Bagian Lancar TPA
Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TA 2017	TA 2016
	- tidak ada -	-	-
	Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Pendek
Rp (0)

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp(0) dan Rp(0).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka
Rp0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TA 2017	TA 2016
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp17.407.391

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp17.407.391 dan Rp17.316.048.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TA 2017	TA 2016
Barang Konsumsi	10.054.983	9.041.091
Barang untuk Pemeliharaan	6.868.908	7.594.957
Bahan Baku	483.500	680.000
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	17.407.391	17.316.048

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR
Rp0

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TA 2017	TA 2016
	- tidak ada -	-	-
	Jumlah	-	-

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset

tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	TA 2017	TA 2016
1	- tidak ada -	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp(0)*

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp(0) dan Rp(0). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	-	-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

*Tanah
Rp70.041.447.000*

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp70.041.447.000 dan Rp14.254.245.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	14.254.245.000
Mutasi tambah:	
Koreksi nilai tim penertiban aset (revaluasi)	55.787.202.000
Mutasi kurang:	
- tidak ada -	-
Saldo per 31 Desember 2017	70.041.447.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	6.211 m ²	Jl. Brigjend Katamso no 139 Yogyakarta	70.041.447.000
Jumlah			70.041.447.000

Tanah seluas 6.211 m² yang terletak di Jl. Brigjend Katamso no 139 Yogyakarta pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peralatan dan Mesin
Rp4.174.123.990

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp4.174.123.990 dan Rp3.968.233.490. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	3.968.233.490
Mutasi tambah:	
Pembelian	205.890.500
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2017	4.174.123.990
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(3.203.880.210)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	970.243.780

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

1. Pembelian Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (1 unit mesin cuci kendaraan, 5 unit almari besi/metal, 5 unit *filling cabinet* besi, 100 unit kursi besi, 20 unit kursi *fiber glass*/plastik, 1 unit mesin penghisap debu, dan 3 unit AC split) senilai Rp139.443.000;
2. Pembelian Alat Pengolah Data dan Komunikasi (1 unit *barcode scanner*, 1 unit *video camera*, 3 unit printer, 4 unit *handy talky*, 5 unit UPS, 1 unit *computer server*, 1 unit *memory card*, 5 unit *harddisk* eksternal, dan 1 unit mesin absensi *fingerprint*) senilai Rp66.447.500.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp 7.695.421.000.

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp7.695.421.000 dan Rp4.092.208.900. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan

Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	4.092.208.900
Mutasi tambah:	
Koreksi nilai tim penertiban aset (revaluasi)	5.169.223.141
Mutasi kurang:	
Koreksi semu hasil penilaian kembali (revaluasi)	(1.566.011.041)
Saldo per 31 Desember 2017	7.695.421.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(160.940.854)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	7.534.480.146

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp100.550.000*

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp100.550.000 dan Rp100.550.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	100.550.000
Mutasi tambah:	
- tidak ada -	-
Mutasi kurang:	
- tidak ada -	-
Saldo per 31 Desember 2017	100.550.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(5.027.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	95.522.500

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya
Rp495.252.250*

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp495.252.250 dan Rp495.252.250. Aset tetap tersebut berupa buku-buku dan barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2017. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(3.369.848.564)

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp(3.369.848.564) dan Rp(4.205.308.648). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.174.123.990	3.203.880.210	970.243.780
2	Gedung dan Bangunan	7.695.421.000	160.940.854	7.534.480.146
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.550.000	5.027.500	95.522.500
4	Aset Tetap Lainnya	495.252.250	0	495.252.250
Akumulasi Penyusutan		12.465.347.240	3.369.848.564	9.095.498.676

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta tidak memiliki Aset Tak Berwujud. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	-
Mutasi tambah:	
- tidak ada -	-
Mutasi kurang:	
- tidak ada -	-
Saldo per 31 Desember 2017	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	-
Nilai Buku per 31 Desember 2017	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
- tidak ada -	-
Jumlah	-

Aset Lain-Lain
Rp169.546.850

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp169.546.850 dan Rp169.546.850. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	169.546.850
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2017	169.546.850
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(169.445.031)
Nilai Buku per 30 Desember 2017	101.819

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp(169.445.031)

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp(169.445.031) dan Rp(168.639.625). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	169.546.850	169.445.031	101.819
Jumlah	169.546.850	169.445.031	101.819

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak

terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Pada akhir tahun, uang muka ini harus dinolkan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp10.500.169

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp10.500.169 dan Rp21.154.909. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga berupa kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan 2 orang pegawai bulan Oktober s.d. Desember 2017 serta belanja listrik dan telepon bulan Desember 2017 yang akan dibayar pada awal tahun 2018. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1.140.069	Belanja Kekurangan Gaji Pokok dan Tunjangan PNS bulan Okt s.d. Des 2017
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	9.357.100	Belanja Langganan Listrik dan Telepon Bulan Desember 2017
Total	10.497.169	

Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp0

C.25 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai berikut:

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	Jumlah
- tidak ada -	-
Total	-

Ekuitas
Rp79.143.957.717

C.26 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp79.143.957.717 dan Rp18.702.249.356. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	TA 2017	TA 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta tidak mempunyai pendapatan penerimaan negara bukan pajak pada TA 2017 dan TA 2016 karena bukan merupakan satuan kerja pengelola penerimaan negara.

Beban Pegawai
Rp5.630.575.828

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.630.575.828 dan Rp6.263.567.279. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017	TA 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	3.414.848.887	3.821.851.920	(10,65)
Beban Tunjangan-Tunjangan	1.725.441.147	1.924.549.049	(10,35)
Beban Uang Makan PNS	477.787.000	497.872.000	(4,03)
Beban Lembur	20.787.000	29.696.000	(30,00)
Pengembalian Beban Pegawai	(8.288.206)	(10.401.690)	(20,32)
Jumlah	5.630.575.828	6.263.567.279	(10,11)

Beban Persediaan
Rp31.576.288

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp31.576.288 dan Rp66.902.642. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017	TA 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	30.715.788	65.110.767	(52,83)
Beban Persediaan Bahan Baku	860.500	1.431.875	(39,90)
Beban Persediaan Lainnya	-	360.000	-
Jumlah Beban Persediaan	31.576.288	66.902.642	(52,80)

*Beban Barang dan Jasa
Rp3.056.437.743*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.056.437.743 dan Rp2.641.089.609. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017	TA 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Langganan Daya dan Jasa	119.499.735	129.997.204	(8,08)
Beban Keperluan Perkantoran	316.799.828	69.122.955	358,31
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	163.200.000	138.360.000	17,95
Beban Barang Operasional Lainnya	19.280.000	37.593.800	(48,71)
Beban Bahan	598.477.530	890.343.590	(32,78)
Beban Honor Output Kegiatan	230.400.000	206.286.000	11,69
Beban Barang Non Operasional Lainnya	632.227.500	382.073.530	65,47
Beban Sewa	358.770.000	207.810.000	72,64
Beban Jasa Pos dan Giro	6.034.150	5.175.530	16,59
Beban Jasa Konsultan	-	-	-
Beban Jasa Profesi	318.525.000	224.930.000	41,61
Beban Jasa Lainnya	294.800.000	349.397.000	(15,63)
Pengembalian Beban Barang dan Jasa	(1.576.000)	-	-
Jumlah	3.056.437.743	2.641.089.609	15,73

*Beban Pemeliharaan
Rp306.722.614*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp306.722.614 dan Rp352.628.739. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017	TA 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	212.937.900	251.521.820	(15,34)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.998.653	86.673.867	(11,16)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	16.786.061	14.433.052	16,30
Jumlah	306.722.614	352.628.739	(13,02)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp1.980.414.105

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.980.414.105 dan Rp1.389.951.195. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017	TA 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	570.314.950	511.417.295	11,52
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	154.004.000	88.825.000	73,38
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	673.385.000	134.457.000	400,82
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	582.710.155	655.251.900	(11,07)
Jumlah	1.980.414.105	1.389.951.195	42,48

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp716.005.000

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp716.005.000 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pelaksanaan pendokumentasian terhadap aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan. Terdapat perubahan klasifikasi akun dari belanja bahan ke belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat untuk kegiatan pencetakan jurnal, majalah, hasil penelitian, cerita bergambar, dan proseding dari 521211 ke 526311.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	716.005.000	-	-
Jumlah	716.005.000	-	-

Selama TA 2017 terdapat penyerahan barang kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Pengiriman hasil inventarisasi cerita bergambar kepada pemda dan masyarakat sebanyak 1.000 eksemplar, dengan rincian 845 eksemplar dikirimkan ke instansi dan sekolah dasar di DIY, Jateng, dan Jatim, dan 155 eksemplar disimpan oleh BPNB DIY untuk kemudian dibagikan kepada tamu

- atau peserta event yang diselenggarakan oleh instansi. Daftar instansi dan sekolah dasar penerima terdapat dalam lampiran laporan keuangan ini.
2. Pengiriman majalah Patra Widya Vol. 18 No. 1 Edisi April 2017 sebanyak 650 eksemplar, dengan rincian 390 eksemplar dikirim ke wilayah DIY, 43 eksemplar ke wilayah Jawa Tengah, 30 eksemplar ke Jawa Timur, 58 eksemplar ke wilayah DKI Jakarta, 12 eksemplar ke wilayah Jawa Barat, 22 eksemplar ke wilayah Luar Jawa, 27 eksemplar dibagikan kepada penulis dan dewan redaksi, 31 eksemplar dibagikan kepada peneliti BPNB DIY, 36 eksemplar dibagikan kepada lembaga di lingkungan Kemdikbud, dan 1 eksemplar disimpan untuk arsip kantor.
 3. Pengiriman jurnal Jantra Vol. 18 No. 1 Edisi Juni 2017 sebanyak 500 eksemplar, dengan rincian 207 eksemplar dikirim ke wilayah DIY, 49 eksemplar ke wilayah Jawa Tengah, 27 eksemplar ke Jawa Timur, 64 eksemplar ke wilayah DKI Jakarta, 26 eksemplar ke wilayah Jawa Barat, 18 eksemplar ke wilayah Luar Jawa, 98 eksemplar dibagikan kepada penulis dan dewan redaksi karyawan BPNB DIY, dan 11 eksemplar disimpan oleh BPNB DIY untuk kemudian dibagikan kepada tamu atau peserta event yang diselenggarakan oleh instansi.
 4. Pengiriman jurnal Jantra Vol. 18 No. 2 Edisi Desember 2017 sebanyak 400 eksemplar, dengan rincian 287 eksemplar dikirim ke wilayah DIY-Jawa Tengah-Jawa Timur, 90 eksemplar dibagikan kepada penulis dan dewan redaksi karyawan BPNB DIY, dan 23 eksemplar disimpan oleh BPNB DIY untuk kemudian dibagikan kepada tamu atau peserta event yang diselenggarakan oleh instansi.
 5. Pengiriman majalah Patra Widya Vol. 18 No. 2 Edisi Agustus 2017 dan No. 3 Edisi Desember 2017 sebanyak @400 eksemplar, dengan rincian 300 eksemplar dikirim ke wilayah DIY, 32 eksemplar ke wilayah Jawa Tengah, 24 eksemplar ke Jawa Timur, 116 eksemplar ke wilayah DKI Jakarta, 24 eksemplar ke wilayah Jawa Barat, 18 eksemplar ke wilayah Luar Jawa, 170 eksemplar dibagikan kepada penulis dan dewan redaksi, 58 eksemplar dibagikan kepada peneliti BPNB DIY, dan 58 eksemplar disimpan untuk arsip kantor.
 6. Pengiriman Naskah Proseding Seminar Hasil Penelitian BPNB Seluruh Indonesia sebanyak 1.000 eksemplar, dengan rincian 378 eksemplar dikirim ke wilayah DIY, 304 eksemplar ke wilayah Jawa, 200 eksemplar ke wilayah Luar Jawa, 90 eksemplar dibagikan kepada panitia dan pegawai BPNB DIY, dan 28 eksemplar disimpan untuk arsip kantor.
 7. Pengiriman Naskah Hasil Penelitian BPNB D.I. Yogyakarta sebanyak 11

judul @500 eksemplar, dengan rincian 2.101 eksemplar dikirim ke wilayah DIY, 649 eksemplar ke wilayah Jawa Tengah, 616 eksemplar ke wilayah Jawa Timur, 429 eksemplar ke wilayah DKI Jakarta, 154 eksemplar ke wilayah Jawa Barat, 198 eksemplar ke wilayah Luar Jawa, 660 eksemplar dibagikan kepada pegawai BPNB DIY dan 693 eksemplar disimpan untuk arsip kantor.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017	TA 2016	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp731.356.363

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp731.356.363 dan Rp654.742.489. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2017 dan TA 2016

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2017	TA 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	524.623.220	550.083.961	(4,63)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	203.413.987	99.852.069	103,72
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	2.513.750	2.513.750	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	805.406	2.292.709	(64,87)
Jumlah Penyusutan	731.356.363	654.742.489	11,70
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	731.356.363	654.742.489	11,70

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017	TA 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Lain-lain
Rp0

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017	TA 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp1.022.910

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	TA 2017	TA 2016	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	225	6.000.590	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan*	1.794.185	1.881.719	(4,65)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan*	(771.500)	(1.395.030)	(44,70)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.022.910	6.487.279	(84,23)

*)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa
Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	TA 2017	TA 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki pos luar biasa pada periode pelaporan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp18.702.249.356*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp18.702.249.356 dan Rp18.842.623.801.

*Defisit LO
Rp(12.452.065.031)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp(12.452.065.031) dan Rp(11.362.394.674). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar
Rp0*

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar merupakan pengaruh kumulatif yang bersifat retrospektif terhadap laporan keuangan sebagai akibat dari suatu perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan ataupun berupa kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, termasuk kecurangan (*fraud*) atau kelalaian.

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016.

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

*Penyesuaian Nilai
Aset
Rp0*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
- tidak ada -	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp60.956.425.141

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp60.956.425.141 dan Rp0. Revaluasi aset tetap berupa tanah, gedung, dan bangunan dilaksanakan pada bulan Oktober 2017. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap TA 2017

Jenis Aset Tetap	Jumlah
Tanah	55.787.202.000
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	5.169.223.141
Jaringan	-
Aset Tetap Lainnya	-
Jumlah	60.956.425.141

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0

E.4.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp(211.053.145). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Pada BPNB DIY, tidak ada koreksi pencatatan aset tetap nonrevaluasi pada TA 2017.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi TA 2017

Rincian Koreksi Pencatatan Aset Tetap	Jumlah
- tidak ada -	-
Jumlah	-

Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2016 terdapat koreksi pencatatan aset tetap nonrevaluasi dengan sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016

Rincian Koreksi Pencatatan Aset Tetap	Jumlah
Penambahan saldo akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang diterima dari satker BPSNT Yogyakarta	(41.366.603)
Kapitalisasi naskah/manuskrip hasil digitalisasi TA 2015 berdasarkan temuan ltjen Kemdikbud	50.600.000
Koreksi penyusutan peralatan dan mesin	33.022.513
Koreksi penyusutan gedung dan bangunan	(253.309.060)
Koreksi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	5
Jumlah	(211.053.145)

*Koreksi Lain-Lain
Rp0*

E.4.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp(20.421.935). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain sampai dengan TA 2017 terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Koreksi	Jumlah Koreksi
- tidak ada -	-
Jumlah	-

Sementara itu, koreksi lain-lain pada TA 2016 terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Koreksi	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban tahun 2015 yang dibayar pada tahun 2016	20.421.935
Jumlah	20.421.935

*Transaksi Antar
Entitas
Rp11.937.348.251*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas terdiri dari ditagihkan ke entitas lain, diterima dari entitas lain, transfer keluar, transfer masuk, pengesahan hibah langsung, dan pengesahan pengembalian hibah langsung. Transaksi Antar Entitas untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp11.937.348.251 dan Rp11.453.495.309. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Transaksi Antar Entitas

Jenis Transaksi Antar Entitas	Jumlah
Ditagihkan ke Entitas Lain	11.937.348.476
Diterima dari Entitas Lain	(225)
Transfer Masuk / Keluar	-
Jumlah	11.937.348.251

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar Rp225 sedangkan DKEL sebesar Rp11.937.348.476.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0 terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
	- tidak ada -	- tidak ada -	-
	Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk TA 2017 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	- tidak ada -	- tidak ada -	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir
Rp79.143.957.717

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp79.143.957.717 dan Rp18.702.249.356.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting pada kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta setelah tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan laporan ini selesai disusun

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT BPK

Tidak ada saldo temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017

F.3 REKENING PEMERINTAH

Pada tahun 2017 Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta mengelola sebanyak 1 rekening. Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Bank BPD DIY dengan nomor 006111001205 a.n. BPg 030 BPNB Yogyakarta

F.4 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36751/A.A3/KU/2015 Tanggal 12 Mei 2015 dan SK KPA Nomor 004/E.30/KP/2017 Tanggal 3 Januari 2017 sebagaimana diubah dengan SK KPA Nomor 1527/E.30/KP/2017 Tanggal 29 September 2017, pada tahun 2017 Pejabat Perbendaharaan yang ada pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Dra. Christriyati Ariani, M.Hum.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Suyono, S.IP.
Pejabat Penandatanganan SPM	: Dra. Siti Rohyani, M.Hum.
Bendahara	: Sardjiastuti